



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)**

**INSPEKTORAT  
KABUPATEN SORONG**

TAHUN ANGGARAN 2022

## Kata Pengantar

**P**enyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2022 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai kewajiban untuk melaporkan kinerjanya sepanjang tahun anggaran kepada bidang pengawasan dan atas realisasi anggaran Inspektorat Kabupaten Sorong serta kepada Pimpinan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja harus pula menyajikan penjelasan tentang deviasi antara realisasi kegiatan dengan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah diperlukan pola pengukuran kinerja yang dimulai dari perencanaan strategi dan berakhir pada pengukuran atas kegiatan, program dan kebijakan yang dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Mendasarkan pada kewajiban untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan, Inspektorat Kabupaten Sorong menyusun LAKIP Tahun 2022 dengan menyajikan pengungkapan keberhasilan dan kegagalan serta hambatan yang dijumpai untuk perbaikan di masa yang akan datang.

Aimas, Februari 2023  
Inspektur Kabupaten Sorong



Dr. Ari Wijayanti, SE. MM  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19700505 199603 2 003

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Struktur Organisasi .....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	7
1.4 Dasar Hukum .....	8
1.5 Sistematika Penyusunan .....	9
BAB II .....	12
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA .....	12
2.1 Visi dan Misi.....	12
2.2 Tujuan dan Sasaran.....	13
2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	15
2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran .....	16
2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja .....	17
BAB III .....	19
AKUNTABILITAS KINERJA .....	19
3.1 Pengukuran Kinerja .....	19
3.2 Analisis Kinerja.....	22
BAB IV .....	37
PENUTUP .....	37
4.1 Kesimpulan.....	37
4.2 Saran .....	37

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Terselenggaranya tata pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa, oleh karena itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan legitimate, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasilguna, bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme disebutkan bahwa salah satu asas umum penyelenggaraan negara adalah asas akuntabilitas. Asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat ataurakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instansi yang bersangkutan.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka mewujudkan good governance dan sekaligus result oriented government, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian ke depan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan output dan outcome yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasis kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran ke kinerja yang direncanakan dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui cost efficiency dan cost effectiveness anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan media pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan membangun secara baik dan benar (Good Governance) yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, menjadikan instansi pemerintah yang akuntabel sehingga dapat beroperasi secara efektif, efisien dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya, menjadikan masukan dan umpan balik bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka meningkatkan kinerja instansi pemerintah, serta terpeliharanya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Bertitik tolak dari RENSTRA Inspektorat Tahun 2021, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Inspektorat Tahun 2022 dan Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; serta memperhatikan Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah penyusunan LAKIP Tahun 2022 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran RPJMD, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan

pembandingan capaian indikator sasaran, dengan demikian LAKIP Inspektorat menjadi laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Bupati kepada Presiden ini telah disusun dan dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Pemerintah Inspektorat dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintah daerah, senantiasa mengedepankan kepentingan masyarakat, keterbukaan, profesionalitas dan akuntabilitas. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Inspektorat. Realisasi yang dilaporkan dalam LAKIP ini merupakan hasil kegiatan Tahun 2022 yaitu tahun Kedua RENSTRA Inspektorat Tahun 2021.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2022 diharapkan dapat:

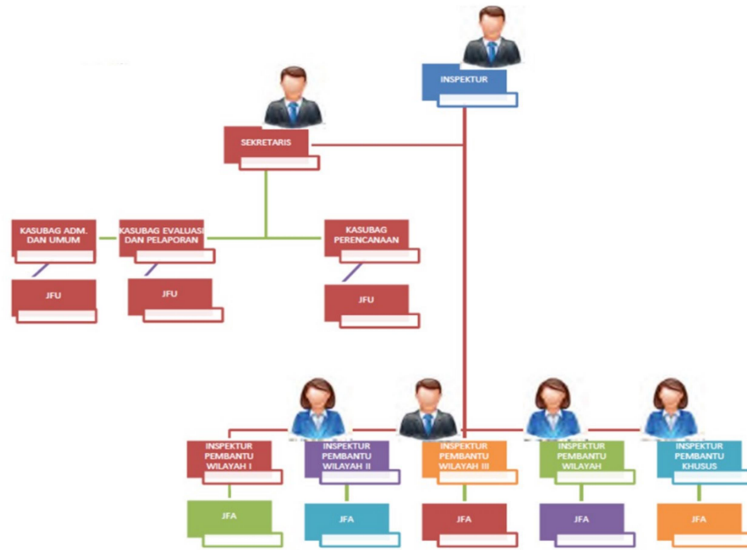
1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Inspektorat Kabupaten Sorong.
2. Mendorong Inspektorat Kabupaten Sorong didalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Inspektorat Kabupaten Sorong di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

## **1.2 Struktur Organisasi**

Struktur Organisasi Inspektorat Kabupaten Sorong menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sorong Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sorong dan Peraturan Bupati Sorong Nomor 26 Tahun 2017 dan perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi serta tata kerja inspektorat kabupaten sorong, sebagai berikut :

- 1) Inspektur
- 2) Sekretaris, membawahi :
  - a) Sub Bagian Perencanaan
  - b) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan
  - c) Sub Bagian Administrasi dan Umum
- 3) Inspektur Pembantu Wilayah I
- 4) Inspektur Pembantu Wilayah II
- 5) Inspektur Pembantu Wilayah III
- 6) Inspektur Pembantu Wilayah IV
- 7) Inspektur Pembantu Khusus
- 8) Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari :
  - a) Jabatan Fungsional Auditor (JFA) :
    - Auditor Madya,
    - Auditor Muda dan
    - Auditor Pertama
  - b) Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah (P2UPD) :
    - Pengawas Madya,
    - Pengawas Muda dan
    - Pengawas Pertama.
  - c) Jabatan Fungsional Umum (JFU) :
    - Bendahara Pengeluaran;
    - Bendahara Gaji;
    - Bendahara Barang.

## STRUKTUR ORGANISASI INSPEKTORAT KAB. SORONG.



Bagan 1.2 Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Inspektorat Kabupaten Sorong mempunyai fungsi :

1. Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan arah dan Tugas Purnantuan oleh Perangkat Daerah
2. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
3. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
4. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
5. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
8. Pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah kabupaten; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrumen penunjang pokok pelaksana tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa jabatan dan kompetensi.

Berdasarkan analisa jabatan kebutuhan pegawai Inspektorat idealnya adalah 70 orang, jumlah pegawai yang ada 41 orang sehingga masih ada kekurangan pegawai sebanyak 29 orang atau 41.43%.

Jumlah personil yang ada per 31 Desember 2022 sebanyak 41 ( empat puluh satu ) yang terdiri dari 10 orang ASN Jabatan Struktural, 8 orang tenaga JFT, dan 23 orang ASN JFA/ PUPD.

Tabel 1.1 Pegawai Berdasarkan Jabatan Pangkat dan Golongan Tahun 2022

Jabatan	Golongan/Ruang	Jumlah	
Inspektur	Pembina Utama	1	orang
Sekretaris	Pembina TK I/Gol IV b	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 1	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 2	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 3	Pembina/Gol IV a	1	orang
Inspektur Pembantu Wilayah 4	Pembina TK I/Gol IV b	1	orang
Inspektur Pembantu Khusus	Pembina TK I/Gol IV b	1	orang
Kepala Sub Bagian Perencanaan	Penata /Gol. III c	1	orang
Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan	Penata TK I/Gol. III d	1	orang
Kepala Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian	Penata /Gol. III c	1	orang
JFA			
Auditor Madya	Pembina TK I/Gol IV b	2	orang
	Pembina /Gol IV a	4	orang
Auditor Muda	Penata /Gol. III c	9	orang
Auditor Pertama	Penata Muda TK I/Gol.	2	orang
PUPD			
Pengawas Madya Pemerintahan	Pembina /Gol IV a	1	orang
Pengawas Muda Pemerintahan	Penata Tk.1/Gol. III d	1	orang
Pengawas Pertama Pemerintahan	Penata Muda Tk.1/Gol.	2	orang
	Penata Muda/Gol. III a	2	orang
Fungsional Umum	Penata TK I/Gol. III d	1	orang
	Penata Muda TK I/Gol.	2	orang
	Penata Muda /Gol. III a	1	orang
	Pengatur TK I/Gol. II d	1	orang
	Pengatur/ Gol. II c	1	orang
	Pengatur Muda TK	1	orang
Tenaga P3K		1	orang
		41	orang

Tabel 1.2 Komposisi pegawai menurut jenjang pendidikan Tahun 2022

No	Jenjang Pendidikan	Jumlah Personil
1	S2	: 6 orang
2	S1	: 39 orang
3	D3	: 10 orang
4	SMA/SMK	: 6 orang
5	SMP	: 1 orang
6	SD	: - orang

Tabel 1.3. Jumlah Pegawai dibanding beban kerja/bezeting Tahun 2022

No.	Jabatann	Formasi	Bezeting	%
1	Struktural	10	10	24.39%
2	Auditor	23	16	39.02%
3	P2UPD	15	6	14.63%
4	Fungsional	17	9	21.95%
	Jumlah	65	41	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Inspektorat belum memenuhi jumlah ideal pegawai dibandingkan dengan beban kerja.

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai berdasarkan Kelamin Tahun 2022

No	Jabatan	Perempuan	Laki-laki
1	Struktural	7	3
2	Auditor	12	10
3	Fungsional	4	5
	Jumlah	23	18

Sumber Data : Sub Bag Umum & Kepegawaian, Desember 2022

### 1.3 Maksud dan Tujuan

#### Maksud

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah. Lakip disusun agar yaitu sebagai;

1. Bahan evaluasi kinerja.
2. Penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

3. Penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang,
4. Penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

### **Tujuan**

Memperhatikan maksud di atas, maka diuraikan tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan LAKIP ini adalah sebagai berikut ;

1. Peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan Organisasi Perangkat Daerah.
2. Meningkatkan kredibilitas dan meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada Organisasi Perangkat Daerah.
3. Mengetahui dan menilai (mengevaluasi) keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah.
4. Sebagai sumber informasi untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka peningkatan kinerja Organisasi Perangkat Daerah secara dan berkesinambungan.
5. Sebagai dasar penyempurnaan dokumen perencanaan tahun berikutnya.

Mendorong Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan fungsinya secara baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

### **1.4 Dasar Hukum**

Dasar hukum yang melandasi disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2022, antara lain :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi

- Jawa Barat (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Peraturan Presiden No 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu atas Laporan Kinerja
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Sorong, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sorong Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Bupati Sorong Nomor 55 Tahun 2017.
  7. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Inspektorat Kabupaten Sorong TA. 2022.

### **1.5 Sistematika Penyusunan**

Sistematika / Instrumen yang digunakan dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi Inspektorat, terdiri dari komponen yang merupakan satu kesatuan berupa:

- 1) Bab I - Pendahuluan;  
Menjelaskan latar belakang, gambaran umum perangkat daerah permasalahan utama dan isu strategis perangkat daerah, sumber daya aparatur, dasar hukum penyusun LKIP dan sistem penyajian LKIP.
- 2) Bab II - Perencanaan dan Perjanjian Kinerja;  
Menjelaskan muatan Renstra 2017 – 2022 (Renstra hasil reviu) tujuan, sasaran, indikator dan target renstra selama lima tahun, lalu penjelasan

target IKU lima tahun yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 2022.

### 3) Bab III - Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub bab ini disampaikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

### 4) Bab III - Penutup.

Menjelaskan kesimpulan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Tahun 2020, permasalahan dan kendala secara umum yang dihadapi, upaya penyelesaiannya serta langkah, solusi dalam perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di masa yang akan datang.

5) Lampiran

Berisi tabel uraian kegiatan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

## **BAB II**

### **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

#### **2.1 Visi dan Misi**

Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan oleh instansi pemerintah. Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang kemana dan bagaimana suatu pemerintahan harus dibawa dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan pembangunan merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu pemerintahan. Visi merupakan gambaran bersama mengenai masa depan berupa komitmen murni tanpa adanya rasa keterpaksaan yang diyakini dan menjadi milik bersama oleh seluruh elemen yang berkepentingan.

Visi Kabupaten Sorong telah dirumuskan dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2017-2022 adalah :

***"Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022."***

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan ditempuh pemerintah daerah untuk mewujudkan visi. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh organisasi (instansi pemerintah) sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa organisasi pada suatu fokus. Misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada, apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya. Misi dan Visi akan mendorong alokasi sumber daya di seluruh organisasi, sehingga kedua ungkapan tersebut harus selaras dengan tugas, agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Pernyataan misi yang jelas akan memberikan arahan jangka panjang dan stabilitas dalam manajemen dan kepemimpinan organisasi pemerintah.

Dengan pernyataan misi yang ditetapkan ini, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal Inspektorat dan mengetahui alasan keberadaan dan perannya lebih dalam.

- Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima.

Makna dari misi tersebut adalah :

Misi 1 : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima.

Sebagaimana visi Kabupaten Sorong, dan berdasarkan Misi ke-5 dari Misi Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022, maka ditetapkan tujuan Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2017-2022 yang ingin dicapai adalah :

***“Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Sesuai Dengan Prinsip Good Governance“***

## **2.2 Tujuan dan Sasaran**

### **2.2.1 Tujuan**

Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang lebih spesifik dan terukur akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan organisasi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif, tujuan organisasi menggambarkan arah strategik organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas dan fungsi organisasi. Tujuan organisasi mempertajam fokus pelaksanaan misi lembaga, meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan arah semua program dan aktivitas lembaga dalam melaksanakan misinya.

Dengan mengacu pada visi dan misi Inspektorat serta didasarkan pada isu-isu strategik dalam RENSTRA Inspektorat Tahun 2019 ditetapkan tujuan yang menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai Pemerintah Inspektorat ada 3, yaitu:

1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah;

2. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance;
3. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan. mewujudkan sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu.

### **2.2.2 Sasaran**

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu kondisi yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh instansi pemerintah melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat. dalam rumusan yang lebih spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

Sasaran yang akan dicapai Inspektorat ada 4 sasaran yaitu :

1. Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional.
2. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas.
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah.
4. Terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan kepastian operasionalisasi dan keterkaitan terhadap peran visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dilihat dari tabel berikut:

### Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Inspektorat

Visi : Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022			
Misi : Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima			
Tujuan	Sasaran	Indikator	
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance.	1. Meningkatnya Kompetensi APiP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APiP Inspektorat Kab.Sorong	
	2. Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas.	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	
	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah		1. Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya
			2. Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)
			3. Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)
	4. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien		1. Nilai SAKIP

### 2.3 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD akan dicapai dengan berbagai strategi yang dibutuhkan untuk keperluan tersebut berupa Kebijakan dan Program. Upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen Renstra tersebut bukan merupakan suatu hal yang mutlak (rigid) tetapi berfungsi sebagai acuan bagi satuan kerja

dalam melaksanakan tanggung jawab dan wewenangnya untuk memaksimalkan usaha - usaha pencapaian tujuan dan sasaran satuan kerja. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Dokumen RPJMD didasari asumsi - asumsi kondisi makro dan kondisi regional pada saat penyusunannya serta prediksi selama lima tahun kedepan. Karena itu seiring dengan tuntutan perubahan dan dinamika pembangunan yang ada ditengah masyarakat maka tidak tertutup kemungkinan dilaksanakannya berbagai upaya lain dalam rangka memaksimalkan pencapaian tujuan dan sasaran, termasuk perbaikan kebijakan, pengembangan program, peningkatan kerjasama dengan berbagai pihak maupun anjuran semen kelembagaan.

Adapun strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan Inspektorat didalam Dokumen RPJMD selengkapnya dituangkan dalam formulir lampiran RENSTRA

#### **2.4 Cara Pencapaian Tujuan dan Sasaran**

Rencana Kinerja merupakan hasil dari proses pengintegrasian antara perencanaan stratejik dengan penganggaran. Proses ini dilaksanakan setiap awal tahun anggaran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat, ketersediaan dana/anggaran serta hasil capaian kinerja yang lalu berdasarkan koridor yang telah digariskan dalam Dokumen Renstra. Rencana Kinerja Tahunan adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Inspektorat, sehingga melalui proses ini diharapkan seluruh target pencapaian sasaran dan tujuan dapat dilaksanakan sesuai agenda pembangunan yang telah disusun. Rencana Kinerja merupakan bentuk komitmen pencapaian kinerja yang menjabarkan rencana kegiatan dan target kinerja tahunan yang dikomitmenkan oleh organisasi untuk dicapai dalam tahun yang bersangkutan.

Perencanaan kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Inspektorat dalam tahun 2020 selengkapnya dituangkan dalam formulir rencana kinerja.

## **2.5 Penetapan/Perjanjian Kinerja**

Perjanjian kinerja atau kontrak kinerja adalah janji untuk melaksanakan amanat pencapaian kinerja yang harus dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan yang telah ditetapkan. Perjanjian kinerja tersebut dituangkan ke dalam Dokumen Penetapan Kinerja yang merupakan dokumen pernyataan kinerja /kesepakatan kinerja/ perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten.

Dokumen penetapan kinerja sebagai dokumen perjanjian kinerja diturunkan dari RPJMD dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT), melalui proses penganggaran yang dimulai dari musrenbang, penyusunan RKPD, penyusunan KUA-PPAS sampai dengan APBD disahkan melalui PERDA, dokumen RKT tersebut menjadi rencana kinerja yang definitive menjadi Penetapan Kinerja.

Dokumen penetapan kinerja tersebut di dibuat setelah APBD disetujui dan disahkan oleh DPRD. Ditingkat OPD dokumen penetapan kinerja di buat oleh Kepala OPD, yang berisi janji dari Kepala OPD kepada Bupati untuk mencapai sasaran dan target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan (RPJMD), ditingkat KABUPATEN dokumen penetapan kinerja dibuat oleh Bupati untuk disampaikan kepada Presiden melalui menPAN dan Reformasi Birokrasi.

Sasaran-sasaran dalam perjanjian kinerja tahun 2022 sebagaimana yang dituangkan dokumen penetapan kinerja adalah sebanyak 3 sasaran stratejik. Program dan 26 kegiatan yang dibiayai dari APBD dengan jumlah anggaran sebesar Rp.14,625,929,656,00 dan Realisasi sebesar Rp. 13,134,325,289,00 atau 89,802%

Perjanjian kinerja masing - masing urusan pemerintahan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Inspektorat dalam tahun 2022 selengkapnya dituangkan dalam formulir penetapan kinerja. Gambar 2.1 sebagai berikut :

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN  
2022  
INSPEKTUR**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten.Sorong	Level	3
2	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Level	3
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK	%	60,00
		Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama	%	60,00
		Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak	%	60,00
		Nilai SAKIP	Nilai	61.00


No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan/Sumber dana
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.5,710,464,664,-	APBD- DBH
2	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp.4,023,266,000,-	APBD- DBH
3	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Rp.2,749,551,750,-	APBD- DBH
		<u>Rp.12,483,314,434,-</u>	

Pihak Kedua,  
**BUPATI SORONG**

Dr. JOHNY KAMURU, SH, M.SI.

Almas, 03 Februari 2022  
Pihak Pertama,

**INSPEKTUR**

  
Dr. ARI WIJAYANTI SE ,MM.  
NIP. 19700505 199603 2 003

## **BAB III**

### **AKUNTABILITAS KINERJA**

#### **3.1 Pengukuran Kinerja**

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan strategis (strategic planning) suatu organisasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dapat dicapai oleh Pemerintah Daerah dalam periode tertentu. Untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi, maka seluruh aktivitas organisasi tersebut dapat diukur, dan pengukurannya tidak semata-mata hanya kepada masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) tetapi lebih ditekankan kepada tercapainya sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien serta hasil program dapat dimanfaatkan.

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan akuntabilitas.

Untuk mengukur kinerja terutama keberhasilan pencapaian masing-masing indikator kinerja hasil (outcome) pada sasaran digunakan pengukuran kinerja melalui skala pengukuran ordinal, dengan kriteria penilaian sebagai berikut, tabel 3.1 sebagai berikut :

<b>INTERVAL NILAI</b>	<b>KRITERIA PENILAIAN</b>
$\geq 100$	Sangat memuaskan
$85 \leq 100$	Sangat Baik
$70 \leq 85$	Baik
$55 \leq 70$	Sedang
$\leq 55$	Kurang Baik

Tabel 3.2 Rencana Kerja dan Realisasi Kegiatan Tahun Anggaran 2022  
melalui Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT)

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana 2022	Realisasi 2022	%
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Eva SAKIP, LPPD, audit Kinerja/Operasional, Audit Barang Milik Daerah, Audit Kepatuhan/Ketaatan	10	10	100.00%
2	Pengawasan Desa	Audit Pengawasan Dana Desa/ Kelurahan	20	20	100.00%
3	Reviu Laporan Keuangan	Reviu Lap Keuangan OPD/ Pemda/Reviu PABJ OPD, Reviu P3DN, Reviu Dana Otsus, DAK	24	14	58.33%
4	Reviu Laporan Kinerja	Reviu LPPD, SAKIP, Monitoring Vaksinasi, Monitoring Inflasi Daerah	10	8	80.00%
5	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Audit Keuangan OPD, audit BMD	10	2	20.00%
6	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Probit Audit PBJ OPD	20	20	100.00%
		Pemeriksaan Khusus Ringan	12	6	50.00%
		Pemeriksaan Khusus Berat	10	2	20.00%
		Audit PBJ/ Monev	200	186	93.00%
7	Kerjasama Pengawasan Internal	SABER-PUNGLI	1	1	100.00%
		Survei Penilaian Integritas (SPI - KPK)	1	1	100.00%
8	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Eksternal/ Internal APIP	6	6	100.00%
9	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	TP-TGR daerah	2	1	50.00%
10	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	E-LKHPN, E-LKHASN	1	1	100.00%
		Zona Integritas	1	1	100.00%
11	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Monitoring Centre of Prevention (MCP- KPK)	1	1	100.00%
12	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Evaluasi Reformasi Birokrasi	1	1	100.00%
		Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1	1	100.00%

No	Kegiatan	Sub kegiatan	Rencana 2022	Realisasi 2022	%
13	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Urusan OPD	8	4	50.00%
		Urusan PEMDA	8	1	12.50%
14	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Digitalisasi Dokumen	1	1	100.00%
		Media Informasi Publik	1	1	100.00%
		Tim Penilai JFA	1	1	100.00%
		Tim Penilai PUPD	1	1	100.00%
15	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Diklat Substantif	36	32	88.89%
		Diklat Non Substantif	8	8	100.00%
		Diklat Penjenjangan	6	0	0.00%
		Ujian Penjenjangan	6	2	33.33%

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab tercapainya kinerja yang diharapkan.

### 3.2 Analisis Kinerja

Misi 1 :

***Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih,  
Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik  
yang Prima.***

Sasaran 1 :

***Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional***

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.3 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong		3 Level	3 Level	3 Level	3 Level	100%	100%

Dari tabel diatas terdapat bahwa tingkat Kapabilitas APIP sebelumnya pada tahun 2021 berada pada level 3 dan periode tahun 2022 target ditetapkan adalah pada level 3 Penilaian tingkat kapabilitas APIP dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Republik Indonesia.

Metode pengukuran indikator kinerja tersebut yaitu berdasarkan laporan hasil penilaian tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh tim BPKP Provinsi Papua Barat dengan Penilaian Mandiri yang menghasilkan laporan **Penilaian kapabilitas APIP** nomor : LHR- PE.09.03/SP-60/PW27/6/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang Hasil Penilaian Tingkat Maturitas.

Penyelenggaraan Sistem Pegendalian Intern Pemerintah pada Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2022 menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP telah berada pada level “terdefinisi” (level 3).

Capaian kinerja hasil penilaian maturitas SPIP = Level 3

Target kinerja hasil penilaian maturitas SPIP = level 3

Tingkat capaian kinerja =  $(3/3) \times 100\% = 100\%$

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian target tersebut antara lain :

1. Komitmen seluruh ASN Inspektorat Kabupaten Sorong untuk meningkatkan Profesionalitas dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP);
2. Komitmen Bupati Sorong dan Pimpinan yang tinggi untuk meningkatkan Kompetensi APIP yang Profesional.

Hambatan/masalah :

1. Kompetensi dan Profesionalitas SDM belum cukup memadai sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengawasan.
2. Pengalaman, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Motivasi yang dapat mempengaruhi profesionalitas dan kapabilitas APIP.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan kompetensi dan profesionalitas para APIP-nya dengan Diklat Substansi dan Non Subtansi dan pembentukan maupun penjenjangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi;
2. Kompetensi dan Profesionalitas para APIP didukung oleh lingkungan kerja yang kondusif dan dinamis serta menerapkan praktik kerja yang dan budaya kerja yang baik;
3. Dukungan Pimpinan dan Pemerintah Kabupaten Sorong dalam alokasi pendanaan serta sinergi baik antar instansi Pemerintah Kabupaten Sorong yang erat.



Nomor : PE.09.03/SP-60/PW27/6/2023 16 Januari 2023  
Lampiran : Satu laporan  
Hal : Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri  
Kapabilitas APIP pada Inspektorat  
Kabupaten Sorong Tahun 2022

Yth. Pj. Bupati Sorong  
di Alimas

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, kami telah melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Sorong sebagaimana Laporan Nomor: PE.09.03/LHP-402/PW27/6/2022 tanggal 30 November 2022 terlampir.

Hasil evaluasi menunjukkan tingkat kapabilitas APIP di lingkungan Inspektorat Kabupaten Sorong tahun 2022 berada pada level 3 (skala 1 – 5) dengan karakteristik *delivered*, yakni APIP telah melaksanakan aktivitas pengawasan (*assurance* dan *consulting*) sesuai dengan standar dan hasil pengawasan APIP telah berkualitas dalam memberikan keyakinan memadai atas ketaatan dan 3E, peringatan dini, dan peningkatan efektivitas manajemen risiko, serta perbaikan tata kelola. Simpulan per elemen kapabilitas APIP sebagai berikut:

No.	Elemen	Level	Skor
Komponen Dukungan Pengawasan ( <i>Enabler</i> )			
1.	Pengelolaan Sumber Daya Manusia	3	0,540
2.	Praktik Profesional	3	0,540
3.	Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja	3	0,180
4.	Budaya dan Hubungan Organisasi	3	0,180
5.	Struktur Tata Kelola	3	0,360
Komponen Aktivitas Pengawasan ( <i>Delivery</i> ) dan Kualitas Pengawasan ( <i>Result</i> )			
6.	Peran dan Layanan	3	1,200
Simpulan Entitas		3	3,000

Adapun area yang memerlukan perbaikan oleh Inspektorat Kabupaten Sorong untuk lebih optimal dalam menjalankan peran sebagai mitra strategis Bupati adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia (SDM) inspektorat masih memerlukan pengembangan kompetensi baik sertifikasi jabatan, sertifikasi profesional penunjang pengawasan, maupun teknis substansi, untuk mengatasi *gap* kompetensi dan keterbatasan anggaran;
2. Perencanaan pengawasan telah menggunakan pertimbangan manajemen, tetapi belum menggunakan hasil penilaian risiko dari manajemen, belum berorientasi pada program strategis pemerintah daerah, sehingga hasil pengawasan belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi dari pimpinan daerah. Hal ini juga dipengaruhi masih belum adanya kebijakan terkait dengan manajemen risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong. Selain itu, kegiatan penjaminan kualitas baik oleh pihak eksternal

Gambar 3.1 Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Kapabilitas APIP Kabupaten Sorong.

Sasaran 2 :

***Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas***

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2020	2021	2020	2021	2020	2021
1	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong		3 Skor/Level	3 Skor/Level	3 Skor/Level	3 Skor/Level	100%	100%

Tahun 2022 Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di kabupaten sorong masih berada pada level 3 dari tahun sebelumnya yaitu level 3 pada tahun 2022. Hal ini selaras serta target Pemerintah Kabupaten Sorong dengan raihan Opini Laporan Keuangan oleh BPK-RI yaitu WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sejak tahun 2014. SPIP di tujukan sebagai pencapaian tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Melalui peran dan kerjasama yang erat antar OPD maupun stakeholder terkait diupayakan untuk tahun 2022 ini tetap terjaga raihan tersebut. Pengawasan internal oleh APIP dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong dilakukan secara berkala. Pelaksanaan reviu , audit kinerja maupun pemeriksaan dengan tujuan tertentu hingga evaluasi dan monitoring kegiatan OPD yang dilaksanakan untuk meningkatkan pengawasan internal guna pengendalian kebijakan Kepala Daerah agar tetap sejalan dan berkesinambungan terhadap visi dan misi Bupati Sorong dan mempertahankan Tingkat Maturitas SPIP.



Gambar 3.2 Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI tahun 2021.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Adanya Target dan Komitmen Bupati dan pimpinan SKPD bahwa Implementasi SPIP sebagai salah satu strategi untuk melaksanakan Good Governance.

2. Komitmen dan Kinerja yang baik Seluruh Pimpinan OPD untuk melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang berjenjang.
3. Tingginya harapan masyarakat akan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

Hambatan/masalah :

1. Belum seluruh staf/personil memahami pentingnya implementasi SPIP dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada jenjang terbawah.
2. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan tingkat maturitas pada tahun berikutnya.
3. Pada tahun 2021 pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sedikitnya terganggu masa pandemi covid-19 sehingga salah satu ruang lingkup penilaian SPIP yaitu penilaian kegiatan pengendalian pada pembinaan SDM tidak dilaksanakan.

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Reviu dokumen keuangan, perencanaan, dsb secara berkala dan evaluasi capaian kinerja melalui sistem E-SAKIP.
2. Evaluasi maupun penilaian maturitas SPIP secara berkala dan Pemantauan melalui penerapan Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2021 yang mengatur Penilaian Maturitas SPIP Terintegrasi Pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
3. Melaksanakan pendampingan kepada SKPD yang beresiko/menghadapi kendala dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah.
4. Melaksanakan Perubahan Program Kerja Pengawasan sesuai kondisi dan lingkungan kerja unit OPD serta implementasi SPIP.

Sasaran 3 :

***Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah***

Sasaran tersebut diukur dengan 3 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2022	2022	2021	2022	2021	2022
1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)		80 %	85 %	83.87 %	100 %	129.03%	104.84%
2	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya		55 %	60 %	- 16,67%	- 6,67%	-28%	-6,67%
3	Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)		80 %	82%	100%	83.78 %	125%	102%

Dengan penjelasan pengukuran sebagai berikut:

1. Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya.

Terdapat kenaikan jumlah temuan material BPK dibanding tahun 2022 (Tahun Anggaran 2021) terdapat 15 temuan material dan 41 rekomendasi dibanding tahun 2021 (Tahun Anggaran 2020 ) terdapat 14 temuan dan 36 rekomendasi atau kenaikan hingga 50% dibanding tahun 2019 yang terjadi peningkatan sebesar 14% dibanding tahun 2019 (TA 2018).

Dari indikator diatas Penurunan jumlah temuan material BPK penurunan jumlah temuan dan temuan material yang telah ditindaklanjuti oleh APIP meningkat dan merupakan kerjasama yang baik pada seluruh OPD dilingkungan Kabupaten Sorong.

2. Persentase OPD dengan Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (AKIP) lebih dari atau sama dengan B (%)

Pada tabel Persentase OPD yang memiliki nilai SAKIP dengan kategori B berada pada 100%. Penilaian SAKIP tahun 2022 adalah evaluasi LAKIP OPD tahun anggaran 2021 yang meliputi 5 komponen utama (perencanaan

kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, capaian kinerja).

Hasil evaluasi menunjukkan predikat tahun anggaran 2021 evaluasi SAKIP pada 31 OPD yang berkategori B sebanyak 100% hal ini menunjukkan bahwa target tahun 2021 yaitu 85% adalah dapat terlampaui, terdapat peningkatan skor/ nilai SAKIP OPD lebih dari 61.00 yaitu sebesar 100%.

Peningkatan skor/nilai SAKIP OPD adalah peran dan kerja maksimal OPD yang baik serta lingkungan kerja yang kondusif dan dukungan seluruh Pimpinan OPD.

### 3. Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti

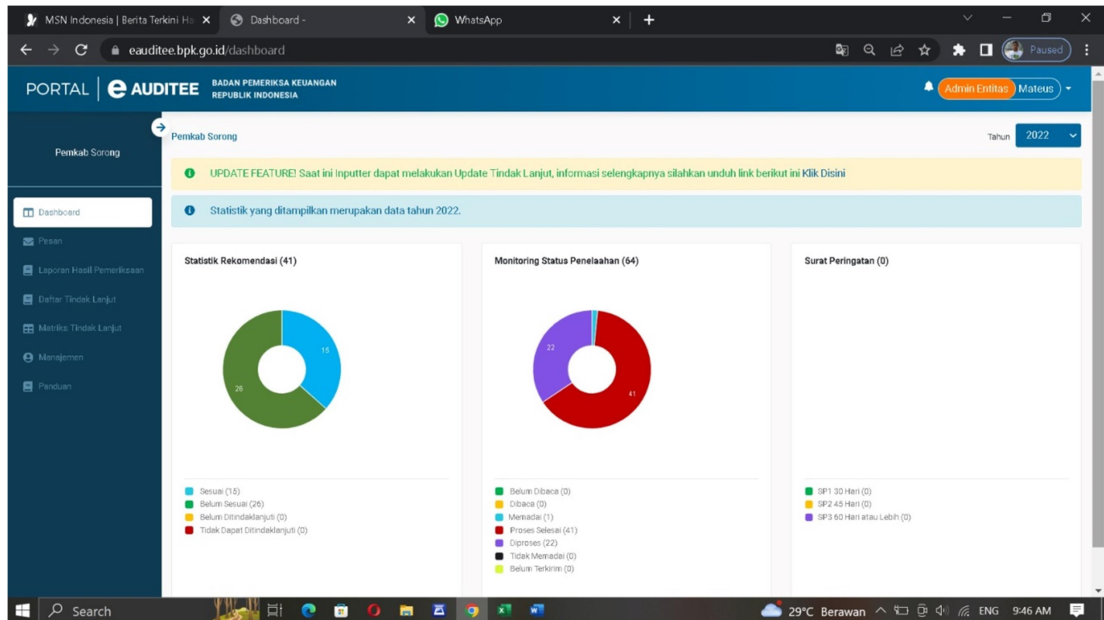
Metode pengukuran indikator kinerja persentase rekomendasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK) selesai ditindaklanjuti yaitu tindak lanjut dengan status Sesuai Rekomendasi pada periode pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan Semester II pada tahun berjalan.

BPK-RI melaksanakan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan atas seluruh jenis pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK selama periode pemeriksaan tahun anggaran 2005 sampai dengan tahun 2022. Status penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan ada 3 tingkatan yaitu: Sesuai Rekomendasi, Belum Sesuai Rekomendasi, dan Belum Ditindaklanjuti.

Inspektorat Kabupaten Sorong sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya pada saat proses pemeriksaan mengkoordinasikan dan mendampingi SKPD, selanjutnya pada saat proses tindak lanjut hasil pemeriksaan mengkoordinasikan dan memfasilitasi SKPD dalam penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dari tahun 2004 hingga Tahun Anggaran 2022 menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan atas obyek pemeriksaan mengungkapkan 382 temuan pemeriksaan dan 894 rekomendasi. Pemerintah Kabupaten Sorong telah menindaklanjuti rekomendasi dengan status Sesuai Rekomendasi sebanyak 749 atau 83,78%. Dalam Proses tindaklanjut terdapat 120 rekomendasi atau 13,42%. Belum proses tindaklanjut 5 rekomendasi atau 0,56% dan tidak dapat Ditindaklanjuti 20 rekomendasi atau 2,24%.

Dari indikator diatas Penurunan temuan material BPK yang telah ditindak lanjuti tahun 2022 untuk TA 2021 adalah 83,78%. Penurunan jumlah temuan dan temuan material yang telah ditindaklanjuti oleh APIP meningkat dan menempati urutan pertama se-Papua Barat dan merupakan kerjasama yang baik pada seluruh OPD dilingkungan kabupaten sorong.



Gambar 3.4 Laporan tindak lanjut APIP Kab.Sorong pada BPK-RI melalui e-auditee.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Semakin baiknya Organisasi Perangkat Daerah dalam mengelola organisasi serta Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah melalui kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala dan berjenjang pada OPD serta kegiatan Inventarisasi Temuan Pengawasan.
2. Tingginya komitmen dan kepedulian stakeholder untuk melaksanakan pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
3. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil temuan internal dan eksternal.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan tingkat penyelesaian temuan pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong maupun lembaga Eksternal dan Kementrian Lembaga;

Strategi/upaya pemecahan masalah :

1. Sinergitas antar Organisasi Perangkat Daerah dalam membantu visi misi Bupati Sorong;
2. Melaksanakan pendampingan/ layanan jasa konsultasi bagi OPD dalam bidang upaya pelaksanaan SAKIP serta penyelesaian temuan dan tindak lanjut;
3. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.

Sasaran 4 : Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Sasaran tersebut diukur dengan 1 indikator kinerja utama yang dapat dilihat pada tabel 3.5 sebagai berikut :

No	Indikator	Kondisi Awal RPJMD	Target		Realisasi		Capaian (%)	
			2021	2022	2021	2022	2021	2022
1	Nilai SAKIP		60 poin	61 poin	62,90 poin	63,25 poin	104,83%	104 %

Peningkatan nilai SAKIP OPD kabupaten sorong dari kategori BB (nilai 60.32) pada tahun 2021 adalah kerjasama yang baik antar institusi pemerintah daerah. Perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan Capaian kinerja yang baik terukur dan terencana merupakan kunci keberhasilan peningkatan nilai SAKIP OPD. Peningkatan nilai SAKIP OPD melalui evaluasi yaitu penilaian Penerapan budaya kinerja yang semakin baik, perbaikan dokumen akuntabilitas kinerja yang terus meningkat mempengaruhi hasil evaluasi oleh KEMENPAN-RB tahun 2019.

Penilaian SAKIP OPD inspektorat dilakukan oleh tim auditor inspektorat/ internal melalui tahap penilaian berjenjang dengan standar AAIP.

Tabel 3.6 Penilaian Sakip OPD Tahun 2017-2021 Oleh Tim Penilai Inspektorat Kabupaten Sorong.

NO	NO LHE	Tanggal LHE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Nilai	PR	Nilai	PR	Nilai	PR	Nilai	PR	Nilai	PR	Nilai	PR
				TA 2016	EDIKAT	TA 2017	EDIKAT	TA 2018	EDIKAT	TA 2019	EDIKAT	TA 2020	EDIKAT	TA 2021	EDIKAT
1	790/46./LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	INSPEKTORAT	61.72	B	61.58	B	62.87	B	62.90	B	62.90	B	63.25	B
2	790/46.1/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN (BAPERLITBANG)	61.15	B	61.23	B	62.31	B	62.27	B	62.27	B	61.95	B
3	790/46.2/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	61.26	B	61.50	B	61.61	B	61.65	B	61.65	B	61.80	B
4	790/46.3/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	SEKRETARIAT DAERAH	61.26	B	61.50	B	61.64	B	61.65	B	61.65	B	61.80	B
5	790/46.4/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)	60.32	B	61.23	B	62.31	B	62.32	B	62.32	B	63.80	B
6	790/46.5/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH (BKP2D)	60.24	B	60.28	B	62.31	B	62.37	B	62.37	B	62.15	B
7	790/46.6/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	60.19	B	60.13	B	60.75	B	60.78	B	60.78	B	62.00	B
8	790/46.7/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	DINAS KESEHATAN	60.21	B	60.73	B	61.14	B	61.16	B	61.16	B	63.20	B

NO	NO LHE	Tanggal LHE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI	PRDIKAT	NILAI	PRDIKAT	NILAI	PRDIKAT	NILAI	PRDIKAT	NILAI	PRDIKAT	NILAI	PRDIKAT
9	790/4 6.8/LH E- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS KEPENDU DUKAN DAN CATATAN SIPIIL	60. 35	B	60. 73	B	61. 47	B	61. 49	B	61. 49	B	61. 80	B
10	790/4 6.9/LH E- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PERUMAH AN DAN KAWASAN PERMUKI MAN	60. 11	B	60. 55	B	60. 68	B	60. 70	B	60. 70	B	61. 20	B
11	790/4 6.10/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	BADAN PENGELOL A PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH	60. 04	B	60. 17	B	61. 01	B	61. 05	B	61. 05	B	61. 95	B
12	790/4 6.11/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD)	55. 09	CC	60. 13	B	60. 78	B	60. 81	B	60. 81	B	61. 20	B
13	790/4 6.12/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIG RASI	55. 06	CC	60. 68	B	61. 24	B	61. 28	B	61. 28	B	62. 00	B
14	790/4 6.13/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PARIWISAT A, PEMUDA DAN OLAH RAGA	54. 88	CC	60. 15	B	60. 24	B	60. 26	B	60. 26	B	61. 70	B
15	790/4 6.14/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PERIKANA N	61. 26	B	61. 50	B	61. 7	B	61. 71	B	61. 71	B	62. 00	B
16	790/4 6.15/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS KETAHANA N PANGAN	60. 76	B	61. 50	B	61. 93	B	62. 55	B	62. 55	B	62. 85	B
17	790/4 6.16/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS KOPERASI DAN UKM	60. 76	B	60. 78	B	60. 7	B	60. 99	B	60. 99	B		CC
18	790/4 6.17/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PERPUSTA KAAN DAN KEARSIPA N	60. 08	B	60. 35	B	60. 43	B	60. 73	B	60. 73	B	61. 00	B
19	790/4 6.18/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	SATUAN POLISI DAN PAMONG PRAJA	54. 63	CC	58. 76	CC	60. 03	B	60. 72	B	60. 72	B	61. 50	B
20	790/4 6.19/L HE- AKIP/2	3- Oct -22	BADAN KESATUAN BANGSA DAN	56. 95	CC	59. 89	CC	61. 01	B	61. 71	B	61. 71	B	61. 95	B

NO	NO LHE	Tanggal LHE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	NILAI	PR EDIKAT	NILAI	PR EDIKAT	NILAI	PR EDIKAT	NILAI	PR EDIKAT	NILAI	PR EDIKAT	NILAI	PR EDIKAT
				TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
	022		POLITIK												
21	790/4 6.20/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN KAMPUNG	56.01	CC	59.42	CC	60.13	B	60.20	B	60.20	B	60.45	B
22	790/4 6.21/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	54.16	CC	59.70	CC	60.26	B	60.70	B	60.70	B	61.35	B
23	790/4 6.22/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	SEKRETARIAT DPRD	60.23	B	60.34	B	60.71	B	60.78	B	60.78	B	61.70	B
24	790/4 6.23/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN	53.20	CC	60.06	B	60.24	B	60.53	B	60.53	B	61.70	B
25	790/4 6.24/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	60.46	B	60.56	B	60.97	B	61.44	B	61.44	B	61.80	B
26	790/4 6.25/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	60.66	B	60.89	B	60.68	B	61.15	B	61.15	B	62.00	B
27	790/4 6.26/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASIDAN USAHA KECIL MENENGAH	52.72	CC	60.03	B	61.26	B	61.30	B	61.30	B	61.40	B
28	790/4 6.27/L HE- AKIP/2 022	3- Oct -22	DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN	60.56	B	60.76	B	61.03	B	61.32	B	61.32	B	61.50	B

NO	NO LHE	Tanggal LHE	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	Nilai	PR ED IK AT	Nilai	PR ED IK AT	Nilai	PR ED IK AT	Nilai	PR ED IK AT	Nilai	PR ED IK AT	Nilai	PR ED IK AT
				TA 2016		TA 2017		TA 2018		TA 2019		TA 2020		TA 2021	
			PERKEBUNAN												
29	790/46.28/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	DINAS SOSIAL	53.78	CC	60.06	B	60.33	B	61.11	B	61.11	B	61.60	B
30	790/46.29/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	DINAS PERHUBUNGAN	60.75	B	60.73	B	60.27	B	61.06	B	61.06	B	62.00	B
31	790/46.30/LHE-AKIP/2022	3-Oct-22	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	53.90	CC	60.15	B	61.51	B	61.53	B	61.53	B	62.00	B

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pencapaian sasaran adalah :

1. Tingginya kepedulian aparat dan stakeholder untuk melaksanakan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan/akuntabel.
2. Komitmen pimpinan yang tinggi untuk segera menyelesaikan seluruh temuan/kelemahan hasil pemeriksaan internal dan eksternal.

Hambatan/masalah :

1. Upaya yang kontinu diharapkan untuk mempertahankan nilai SAKIP yang optimal pada tahun berikutnya.
2. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong.

Upaya meningkatkan keberhasilan penilaian SAKIP oleh eskternal, APIP selaku pengawas pemerintah didaerah bertekad dengan:

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah;

2. Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;

Akuntabilitas keuangan Tahun Anggaran 2022, telah disampaikan kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sorong selaku Entitas Pelaporan. Berhubungan dengan capaian kinerja maka dalam laporan keuangan terdapat **Efisiensi** dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi capaian kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2022 belanja yang dialokasikan pada APBD adalah Rp.14.723.875.482,00 dengan realisasi sebesar Rp.13.134.325.289,00 (89,20%). Jika dibandingkan dengan alokasi anggaran pada tahun 2021 sebesar Rp.7.224.159.072,00- dengan realisasi sebesar Rp.6.341.516.555,00 (87,78%) dan terjadi kenaikan anggaran sebesar Rp.2,542,556,000,- (50,94%).

Tabel 3.6 Pagu Anggaran Tahun Sebelumnya dan Realisasi

No	Uraian	Pagu Anggaran 2021	Pagu Anggaran 2022	Realisasi TA 2022	Capaian (%)
1	2	3	4	5	
	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	7,224,159,072.00	14,723,875,482.00	13,134,325,289.00	
I	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,459,401,225.00	4,519,648,048.00	4,375,793,915.00	97%
II	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya		103,000,000.00	103,000,000.00	100%
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik	5,345,000.00	20,949,000.00	20,869,000.00	100%
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	14,635,000.00	21,258,000.00	21,258,000.00	100%
	Penyediaan Bahan Logistik kantor	64,622,000.00	159,039,000.00	159,039,000.00	100%
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50,960,000.00	79,015,000.00	78,786,236.00	100%
	Fasilitas kunjungan tamu	40,652,000.00	160,824,000.00	150,029,400.00	93%
	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	223,052,000.00	1,114,441,000.00	942,258,682.00	85%
III	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	34,540,000.00	696,443,000.00	676,145,000.00	97%
IV	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,020,000.00	8,600,000.00	2,500,000.00	29%
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	75,480,072.00	54,997,484.00	50,711,514.00	92%

No	Uraian	Pagu Anggaran 2021	Pagu Anggaran 2022	Realisasi TA 2022	Capaian (%)
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,400,000.00	110,400,000.00	110,400,000.00	100%
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	60,000,000.00	54,000,000.00	54,000,000.00	100%
	Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	166,926,400.00	329,315,200.00	257,874,150.00	78%
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	16,160,000.00	244,076,000.00	221,818,000.00	91%
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	12,280,000.00	205,540,000.00	205,040,400.00	100%
V	Penyelenggaraan Pengawasan Internal				
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	111,802,000.00	227,750,000.00	209,700,000.00	92%
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	116,000,000.00	227,750,000.00	215,750,000.00	95%
	Reviu Laporan Kinerja		227,750,000.00	215,750,000.00	95%
	Reviu Laporan Keuangan	661,600,000.00	543,000,000.00	508,800,000.00	94%
	Pengawasan Desa	229,500,000.00	525,300,000.00	465,500,000.00	89%
	Kerjasama Pengawasan Internal	86,020,000.00	307,494,000.00	162,441,800.00	53%
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	229,220,000.00	186,828,000.00	142,641,060.00	76%
	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu				
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	52,250,000.00	168,656,000.00	136,574,304.00	81%
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	875,600,000.00	1,642,870,000.00	1,504,870,000.00	92%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas Pengawasan				
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	19,000,000.00	210,836,000.00	196,997,772.00	93%
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	56,280,000.00	928,251,750.00	728,237,331.00	78%
VI	Pendampingan dan Asistensi				
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah		392,366,000.00	248,186,560.00	63%
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi		494,778,000.00	363,834,000.00	74%
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi		350,422,000.00	220,700,627.00	63%
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas		408,278,000.00	384,818,538.00	94%

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini merupakan wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran strategis dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2020. Pengukuran kinerja LAKIP 2020 ini didasarkan atas objektivitas, kejujuran dan ketransparanan sebagaimana diamanahkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Di dalam LAKIP 2021 disajikan informasi tentang :

1. Pencapaian sasaran strategis organisasi.
2. Realisasi pencapaian indikator kinerja utama organisasi yang telah disempurnakan.
3. Penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja baik dari segi pemenuhan, kualitas dan pemanfaatan/implementasi.
4. Evaluasi atas pencapaian sasaran strategis tahun berjalan dan juga evaluasi tahun sebelumnya.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan analisis dan evaluasi yang telah dilaksanakan dapat ditarik beberapa kesimpulan utama yang terkait dengan akuntabilitas kinerja 2022 yaitu:

- 1) Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Inspektorat Kabupaten Sorong Tahun 2022 ini merupakan jawaban tertulis dari penyelenggaraan Good Governance Inspektorat Kabupaten Sorong.
- 2) Hasil Capaian Kinerja Inspektorat Kabupaten Sorong secara administrasi 90% dimana data ini adalah kegiatan dari bulan Januari 2022 sampai dengan Desember 2022.
- 3) Untuk melaksanakan kebijakan program dan kegiatan dalam mencapai tujuan / sasaran Inspektorat Kabupaten Sorong didukung dana sejumlah Rp.6,837,365,697,- yaitu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.3,504,901,225,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 3,332,464,472,-
- 4) Dari Analisa Keuangan tersebut Inspektorat Kabupaten Sorong telah mengacu pada efisiensi, dimana fisik dapat diselesaikan rata-rata 100% keuangan realisasi 92.75%.
- 5) Disamping dikemukakan gambaran kinerja juga dilaporkan analisis kinerja yang menggambarkan keberhasilan dan kegagalan program kinerja dan kebijakan serta permasalahan yang dihadapi sebagai faktor penghambat keberhasilan yang diinginkan.

Sesuai dengan hasil analisis dan evaluasi, ada beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan dalam melaksanakan pembangunan, penyusunan anggaran dan penyusunan LAKIP yaitu sebagai berikut :

1. Koordinasi dan supervisi yang baik antar Organisasi perangkat daerah di kabupaten sorong dalam upaya sistem akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dengan Mendorong Organisasi perangkat daerah dalam pencapaian kinerja yang lebih baik;
2. APIP menjadi mitra yang baik, trusted advisor, dan early warning system bagi mitranya.
3. Reviu dokumen keuangan, perencanaan, dsb secara berkala dan evaluasi capaian kinerja.
4. Inspektorat kabupaten sorong dalam meningkatkan profesionalitasnya melatih para APIP nya dengan Diklat pembentukan maupun penjurangan jabatan fungsional auditor maupun pengawas urusan pemerintah yang bersertifikasi,

**Indikator Kinerja Utama  
INSPEKTORAT  
2017 s.d 2022**

**Visi :** Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022

- Misi :**
1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima
  2. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima
  3. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

No	Kinerja Utama		Indikator Kinerja Utama	Parameter Pengukuran	Penjelasan
	Tujuan	Sasaran			
1	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance	Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	Hasil Reviu Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP	
		Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	Hasil reviu Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP	
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	OPD dengan nilai lebih dari atau sama dengan B / Jumlah OPD *100	OPD dengan nilai lebih dari atau sama dengan B dibagi Jumlah OPD dikali 100%
			Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)	Jumlah material BPK yang ditindaklanjuti / Jumlah temuan material BPK *100	Persentase tindak lanjut atas temuan BPK yang material dengan seluruh temuan material
			Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	(( Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2 - Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-1 )/ Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2 ) *100	Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya
		Terwujudnya tata kelola pemeruntahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	Nilai SAKIP

### Rencana Strategis

OPD : INSPEKTORAT  
 Visi : Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022  
 Misi : 1. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Nilai	Unit Organisasi	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Nilai	Unit Organisasi
Kabupaten Sorong Maju Bersama, Rakyat Cerdas, Sehat dan Sejahtera 2022	Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan, Profesional dan Akuntabel Berorientasi Pelayanan Publik yang Prima	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang sesuai dengan prinsip Good Governance	Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3		3	3	3	3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	67	SEKRETARIAT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal	Terlaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal	100	SUB BAGIAN PERENCANAAN
											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	SEKRETARIAT	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	1	SUB BAGIAN PERENCANAAN
											Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90	SEKRETARIAT	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
											Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	90	SEKRETARIAT	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	94	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
											Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95	SEKRETARIAT	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik / penerangan untuk bangunan kantor yang di sediakan	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
											Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12	SEKRETARIAT	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga untuk kebersihan kantor	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
											Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90	SEKRETARIAT	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Fasilitas kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas kunjungan Tamu yang disediakan	Jumlah Fasilitas kunjungan Tamu yang disediakan	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin untuk kebutuhan kantor	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	12	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	6	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM
																Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM

Visi	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Data Capaian Awal	Target					Program	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target Nilai	Unit Organisasi	Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Sasaran Kegiatan	Target Nilai	Unit Organisasi
															Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
															Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	100	SUB BAGIAN ADMINISTRASI DAN UMUM	
			Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	2.73		3	3	3	3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	356	INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10	SUB BAGIAN PERENCANAAN
															Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	10	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
															Reviu Laporan Kinerja	Terwujudnya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Reviu Laporan Kinerja	10	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
															Reviu Laporan Keuangan	Terwujudnya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Reviu Laporan Keuangan	24	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
															Pengawasan Desa	Meningkatnya Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa	80	SUB BAGIAN PERENCANAAN	
															Kerjasama Pengawasan Internal	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	2	SUB BAGIAN EVALUASI DAN PELAPORAN	
															Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	100	SUB BAGIAN PERENCANAAN	



Laporan Keseluruhan  
INSPEKTORAT  
Tahun 2022

No	Sasaran	Sasaran Strategis Berorientasi Hasil	No	Indikator Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis Berkualitas	IKU / BUKAN IKU	No	Program				Kegiatan				Anggaran	Ket
								Uraian Program	Sasaran Program	Indikator Program	Program Terlihat Dengan Sasaran	Uraian Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Kegiatan Terlihat Dengan Sasaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Meningkatnya Kompetensi APSP yang Profesional	✓	1	Tingkat Kapabilitas APSP Inspektorat Kab.Sorong	✓	✓	1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	Jumlah Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitas	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Terlaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal	Terlaksananya kegiatan kebijakan pengawasan internal			210.836.000,00	
							2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	928.251.750,00			
							3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan bagi ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan bagi ASN	4.421.962.822,00			
							4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersedianya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Paksi Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103.000.000,00			
							5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Jumlah Komponen listrik / penerangan untuk bangunan kantor yang di sediakan kantor	19.824.000,00			
							6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Peralatan Rumah Tangga untuk kebersihan kantor	21.258.000,00			
							7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Bahan Logistik Kantor	159.039.000,00			
											Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Barang Cetak dan Pengandaan	79.015.000,00			
											Fasilitas kunjungan Tamu	Terlaksananya Fasilitas kunjungan Tamu yang disediakan	Jumlah Fasilitas kunjungan Tamu yang disediakan	160.824.000,00			
											Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.117.749.000,00			
											Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Tersedianya Peralatan Kantor	Jumlah Peralatan dan Mesin untuk kebutuhan kantor	696.443.000,00			
											Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tersedianya Jasa Surat Menyurat	Jumlah Jasa Surat Menyurat	8.600.000,00			
											Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	Jumlah Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik yang disediakan	54.997.484,00			
											Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110.400.000,00			
											Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.000.000,00			
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan	356.871.600,00			
											Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.076.000,00			
											Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205.540.000,00			
2	Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	✓	1	Tingkat Maturitas SPP Kabupaten Sorong	✓	✓	1	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Terlaksananya Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang Berkualitas	Jumlah Pengawasan Internal Pemerintah Daerah	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	227.750.000,00			
											Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	227.750.000,00			
											Revisi Laporan Kinerja	Terwujudnya Revisi Laporan Kinerja	Jumlah Revisi Laporan Kinerja	227.750.000,00			
											Revisi Laporan Keuangan	Terwujudnya Revisi Laporan Keuangan	Jumlah Revisi Laporan Keuangan	543.000.000,00			
											Pengawasan Desa	Meningkatnya Pengawasan Desa	Jumlah Pengawasan Desa	525.300.000,00			
											Kerjasama Pengawasan Internal	Terwujudnya Kerjasama Pengawasan Internal	Jumlah Kerjasama Pengawasan Internal	307.494.000,00			
											Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Meningkatnya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	Jumlah Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APSP	186.828.000,00			
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	✓	1	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	✓	✓	1	Pendampingan dan Asistensi	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi usuan pemerintah daerah yang berkualitas	Jumlah Pendampingan dan Asistensi usuan pemerintah daerah yang berkualitas	Pendampingan dan Asistensi Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Usuan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pendampingan dan Asistensi Usuan Pemerintahan Daerah	392.366.000,00			
											Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	494.778.000,00			
											Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Jumlah Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan	350.422.000,00			
											Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan	Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan	Jumlah Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegekan	408.278.000,00			
											Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Terwujudnya Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168.656.000,00			
											Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Terwujudnya Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Proby Audit yang dapat diselesaikan	1.642.870.000,00			
												Jumlah Pemeriksaan Khusus	Jumlah Audit Pelaksanaan PBJ OPD				
4	Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	✓	1	Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjut (%) Nilai SAKIP	✓	✓											

**Rencana Kinerja Tahunan  
INSPEKTORAT  
2022**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Parameter Pengukuran	Target
1	2	3	4
Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	&nbsp;[Hasil Reviu Kapabilitas APIP yang dikeluarkan oleh BPKP]&nbsp;	3
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	&nbsp;[Hasil reviu Maturitas SPIP yang dikeluarkan oleh BPKP]&nbsp;	3
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	&nbsp;[OPD dengan nilai lebih dari atau sama dengan B]&nbsp;/&nbsp;[Jumlah OPD]&nbsp;*100	80.65
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	((&nbsp;[Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2]&nbsp;/&nbsp;[Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-1]&nbsp;)-&nbsp;[Jumlah temuan material BPK tahun ke-n-2]&nbsp;)*100	16.67
	Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)	&nbsp;[Jumlah material BPK yang ditindaklanjuti]&nbsp;/&nbsp;[Jumlah temuan material BPK]&nbsp;*100	80
Terwujudnya tata kelola pemeruntahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	&nbsp;[Nilai SAKIP]&nbsp;	62

**Penetapan Kinerja  
INSPEKTORAT  
2022**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Rp. 210,836,000.00
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	Rp. 928,251,750.00
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Rp. 4,421,962,822.00
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 103,000,000.00
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	Rp. 19,824,000.00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 21,258,000.00
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 159,039,000.00
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 79,015,000.00
				Fasilitasi kunjungan Tamu	Rp. 160,824,000.00
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 1,117,749,000.00
				Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 696,443,000.00
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 8,600,000.00
				Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	Rp. 54,997,484.00
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 110,400,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp. 54,000,000.00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Rp. 356,871,600.00			
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	Rp. 214,076,000.00			
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp. 205,540,000.00			
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3	Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Rp. 227,750,000.00
				Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Rp. 227,750,000.00
				Reviu Laporan Kinerja	Rp. 227,750,000.00
				Reviu Laporan Keuangan	Rp. 543,000,000.00
				Pengawasan Desa	Rp. 525,300,000.00
				Kerjasama Pengawasan Internal	Rp. 307,494,000.00
				Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Rp. 186,828,000.00

Sasaran 1	Indikator Kinerja Utama 2	Target 3	Program 4	Kegiatan 5	Anggaran 6
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	80.65	Pendampingan dan Asistensi	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 392,366,000.00
				Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	Rp. 494,778,000.00
				Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	Rp. 350,422,000.00
				Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	Rp. 408,278,000.00
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	16.67	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Rp. 168,656,000.00
				Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Rp. 1,642,870,000.00
	Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)	80			
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	62			

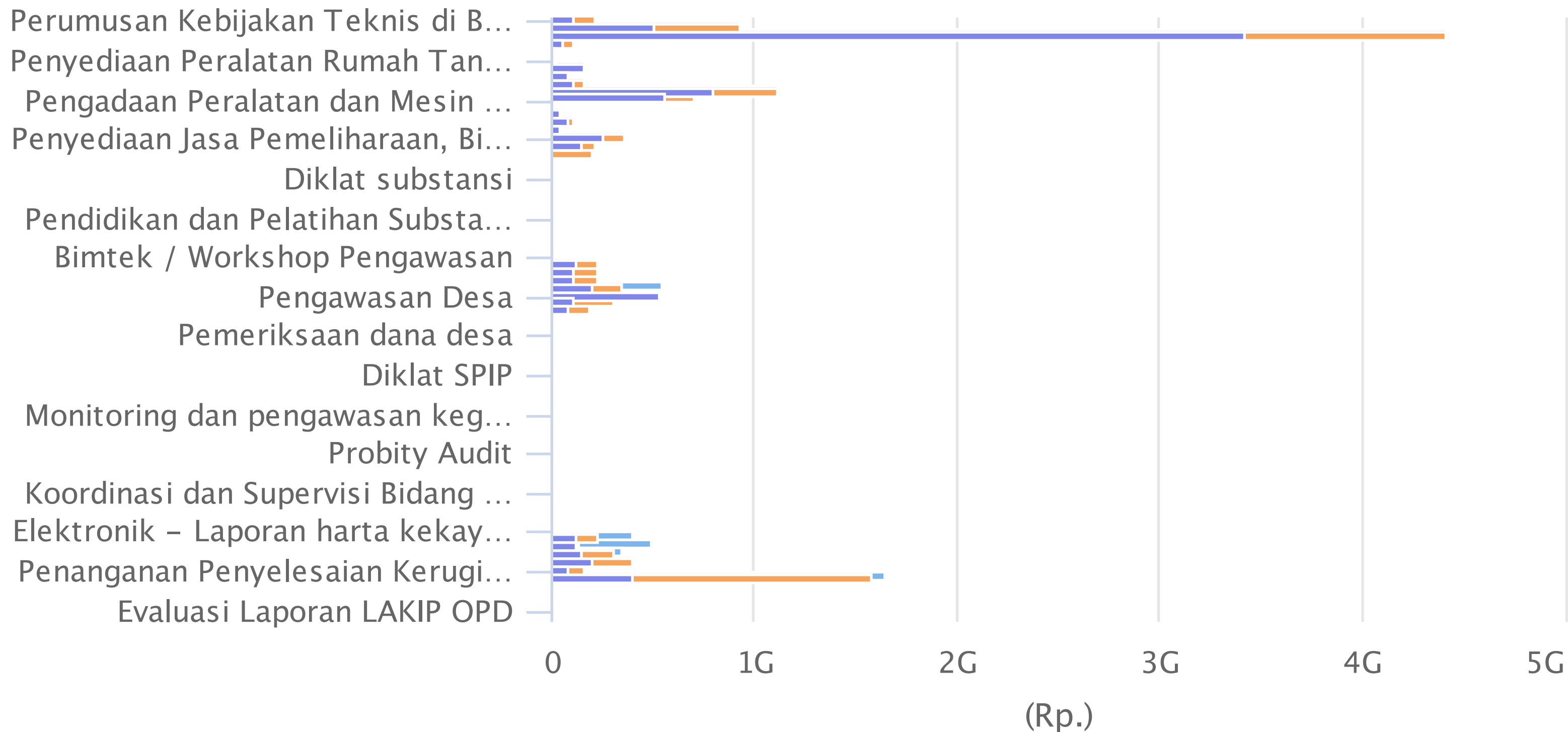
**Monitoring dan Evaluasi Anggaran  
INSPEKTORAT  
2022**

No	Program / Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran				
			TW I	TW II	TW III	TW IV	Total
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan						
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	210,836,000.00	0 %	0 %	47.43 %	46.01 %	196,997,772.00
	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan	928,251,750.00	0 %	21.55 %	32.32 %	24.59 %	728,237,331.10
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	4,421,962,822.00	28.41 %	26.48 %	22.03 %	22.03 %	4,375,793,914.48
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	103,000,000.00	0 %	0 %	50 %	50 %	103,000,000.00
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah						
	Penyediaan Komponen Instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	20,949,000.00	0 %	49.81 %	49.81 %	0 %	20,869,000.00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	21,258,000.00	0 %	50 %	0 %	50 %	21,258,000.00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	159,039,000.00	50 %	0 %	50 %	0 %	159,039,000.00
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	79,015,000.00	0 %	49.86 %	49.86 %	0 %	78,786,236.00
	Fasilitasi kunjungan Tamu	160,824,000.00	0 %	31.09 %	31.09 %	31.11 %	150,029,400.00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1,117,749,000.00	0 %	26.84 %	44.73 %	12.73 %	942,258,682.00
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	696,443,000.00	0 %	76.81 %	3.84 %	16.44 %	676,145,000.00
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8,600,000.00	0 %	0 %	29.07 %	0 %	2,500,000.00
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya Air dan Listrik	54,997,484.00	23.05 %	23.05 %	23.05 %	23.05 %	50,711,514.00
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	110,400,000.00	25 %	25 %	25 %	25 %	110,400,000.00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54,000,000.00	25 %	25 %	25 %	25 %	54,000,000.00
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan						
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	329,315,200.00	0 %	37.96 %	0 %	40.35 %	257,874,150.00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	244,076,000.00	0 %	28.68 %	30.73 %	31.47 %	221,818,000.00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	205,540,000.00	0 %	0 %	0 %	99.76 %	205,040,400.00
8	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	227,750,000.00	0 %	0 %	43.91 %	48.17 %	209,700,000.00
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	227,750,000.00	0 %	43.91 %	0 %	50.82 %	215,750,000.00
	Reviu Laporan Kinerja	227,750,000.00	0 %	0 %	43.91 %	50.82 %	215,750,000.00
	Reviu Laporan Keuangan	543,000,000.00	0 %	0 %	36.83 %	56.87 %	508,800,000.00
	Pengawasan Desa	525,300,000.00	0 %	0 %	57.11 %	31.51 %	465,500,000.00
	Kerjasama Pengawasan Internal	307,494,000.00	0 %	0 %	52.83 %	0 %	162,441,800.00
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	186,828,000.00	0 %	0 %	40.14 %	36.2 %	142,641,060.00
9	Pendampingan dan Asistensi						
	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	392,366,000.00	0 %	0 %	30.58 %	32.67 %	248,186,560.00
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian	494,778,000.00	0 %	0 %	30.32 %	43.22 %	363,834,000.00
	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan	350,422,000.00	0 %	0 %	28.54 %	34.44 %	220,700,627.00
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan	408,278,000.00	0 %	0 %	36.74 %	57.51 %	384,818,538.00
10	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						
	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	168,656,000.00	0 %	0 %	0 %	80.98 %	136,574,304.00
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	1,642,870,000.00	0 %	0 %	60.87 %	30.73 %	1,504,870,000.00
Jumlah		14,629,498,256.00					13,134,325,288.58

**Pengukuran Kinerja  
INSPEKTORAT  
2022**

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
1	2	3	4
Meningkatnya Kompetensi APIP yang Profesional	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab.Sorong	3 Level	3 Level
Meningkatnya Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah yang Berkualitas	Tingkat Maturitas SPIP Kabupaten Sorong	3 Level	3 Level
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintah Daerah	Persentase OPD dengan Nilai SAKIP lebih dari atau sama dengan B (%)	80.65 %	100%
	Persentase Penurunan Jumlah Temuan Material BPK dari tahun sebelumnya	16.67%	23.81 %
	Persentase Temuan Material BPK yang telah di Tindak Lanjuti (%)	80 %	83.78%
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	Nilai SAKIP	62 poin	63.25 poin

# Anggaran SKPD INSPEKTORAT



● **Triwulan 1**  
 ● **Triwulan 2**  
 ● **Triwulan 3**  
 ● **Triwulan 4**  
 ● **Pagu**

# Nilai Kerja SKPD INSPEKTORAT

